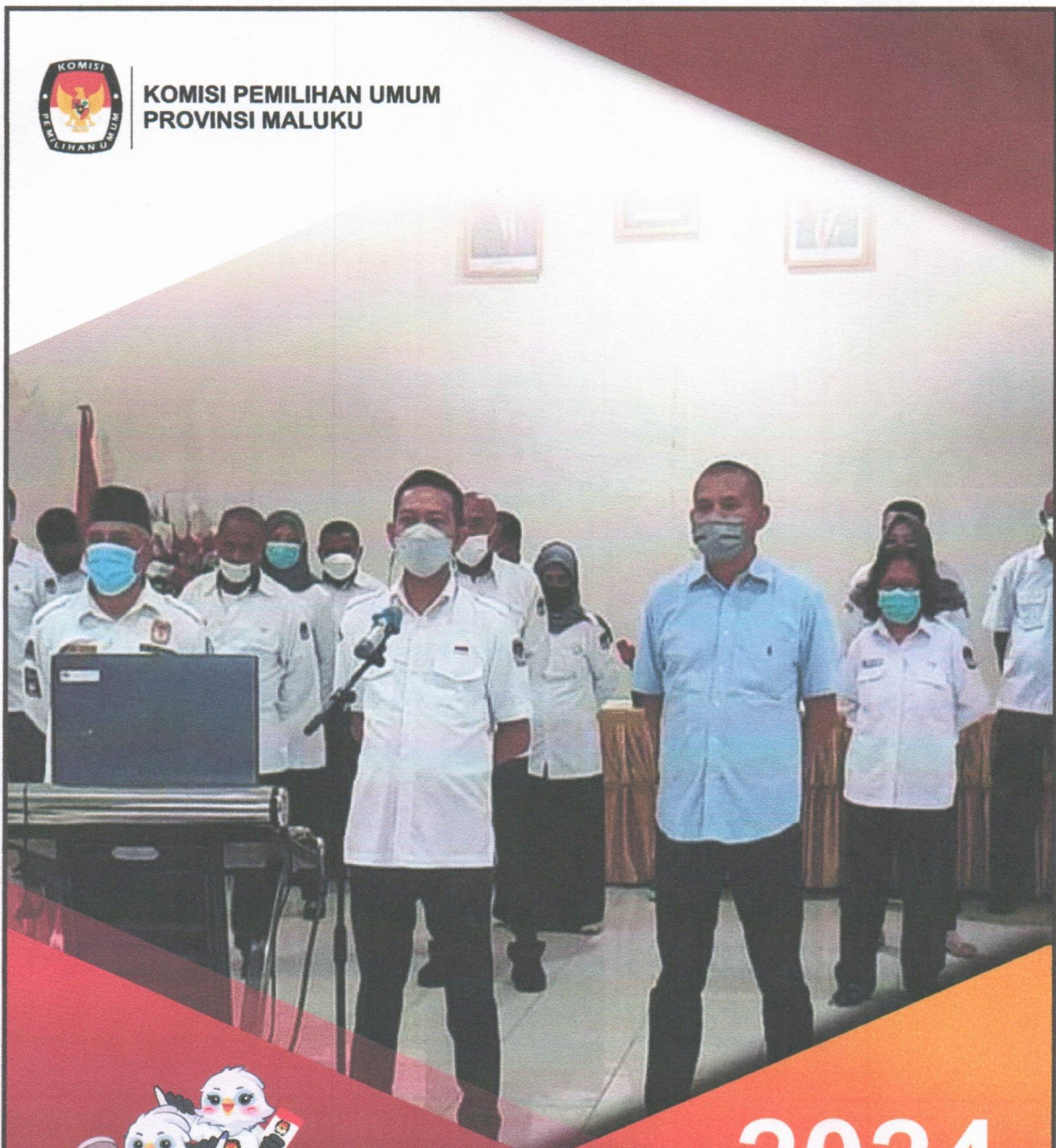




KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU



2024

Rencana Kerja Tahunan

<https://maluku.kpu.go.id> | @kpuprovmaluku | Kpu Provinsi Maluku | KPU Provinsi Maluku

RENCANA KINERJA TAHUNAN

Nama/Unit Organisasi
Tahun

: Sekretariat KPU Provinsi Maluku
: 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator kerja	Target
1	2	3	4
1	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Provinsi Maluku yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	8 kali
2	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	75%
		Persentase target kinerja KPU Provinsi Maluku yang tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	90%
		Persentase dokumen RDP yang tersedia dengan tepat waktu	80%
3	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	97,5%
		Persentase penegakan disiplin pegawai	90%
4	Terlaksananya layanan pengadaan pegawai secara transparan dan akuntabel	Persentase pegawai yang terseleksi secara transparan dan akuntabel	100%
5	Terlaksananya proses seleksi Anggota Provinsi Maluku dan KPU Kabupaten/Kota Se-Maluku sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku	Presentase Anggota Provinsi Maluku dan KPU Kabupaten/Kota Se-Maluku yang di seleksi sesuai dengan periode masa jabatan dan PAW	100%
6	Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase pegawai yang tercatat secara akurat dalam data base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	95%
7	Tersedianya Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Persentase PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) yang diseleksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	100%
8	Pembentukan Badan Adhock	Jumlah badan adhock yang dipersiapkan dan dibentuk	12 Satker (Provinsi/Kabupaten/
8	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase pejabat perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	90%
9	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Lap
10	Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	100%
11	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid	100%
12	Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	100%
		Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan Data SAK	2 Lap
13	Meningkatnya kualitas tata kelola adminsitasi persuratan dan pengelolaan arsip	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mengelola arsip inaktif sesuai aturan kearsipan	87,5%
		Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	75%
14	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Provinsi	Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	75%
		Persentase gedung dan gudang KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota yang berfungsi dengan baik	75%

15	Meningkatnya kualitas layanan persidangan dan protokol	Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat	75%
		Persentase hasil rapat pleno yang ditindak lanjuti paling lambat 4 hari kerja	100%
16	Terwujudnya keamanan dan ketertiban di lingkungan KPU provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dapat ditanggulangi	100%
17	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%
		Persentase gedung dan gudang KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota yang dapat dipenuhi	72%
18	Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU Provinsi Maluku dan KPU Kab/Kota Se-Maluku	Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap realisasi anggaran	30%
19	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan berwibawa (clean governance)	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	95%
20	Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti	75%
21	Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B	70%
22	Peningkatan kompetensi SDM KPU	Persentase pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM	100%
		Jumlah PNS KPU yang lulus S2 Program Studi Tata Kelola Pemilu maupun program studi prioritas KPU lainnya (IT, Akuntansi, Hukum) sesuai jadwal	2 Orang
23	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang undangan	100%
		Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai dengan SOP	100%
24	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Penurunan Jumlah sengketa Hukum yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi	3 Perkara
		Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota	88%
25	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang memutakhirkan data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024	100%
26	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 (Lima) hari kerja	100%
27	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	12 Satker (Provinsi/Kabupaten/
28	Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD	Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan	60%
29	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Provinsi/Kabupaten/Kota yang telah membentuk Pusat Pendidikan Pemilih	12 Satker (Provinsi/Kabupaten/ Kota)

30	Pendidikan Pemilih kepada masyarakat umum	Presentase Satker KPU Kabupaten/Kota yang memiliki Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk masyarakat umum	100%
31	Pendidikan Pemilih kepada Pemilih Pemula , Perempuan dan Disabilitas	Presentase KPU Kabupaten/Kota yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk pemilih Perempuan	100%
		Presentase KPU Kabupaten/Kota yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk pemilih Pemula	100%
		Presentase KPU Kabupaten/Kota yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk Disabilitas	100%
32	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di 10 media massa	100%
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU Provinsi Maluku paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%
33	Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi dan Masyarakat)	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi	12 Satker (Provinsi/Kabupaten/ Kota)
34	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	100%
		Presentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan pengadaan logistik keperluan pemilu/pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	100%
		Presentase KPU Kabupaten/Kota yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	100%
		Persentase KPU Kabupaten/Kota yang menginventarisir dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan	100%
35	Ketersediaan Logistik Pemilu	Presentase Penyediaan Logistik Pemilu	12 Satker
36	Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu	Presentase Pelaksanaan Pemungutan sampai dengan Penetapan Hasil Pemilu	12 Satker
37	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	Persentase KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi yang melaksanakan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%
		Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	100%
		Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi	80%

Program

- 1 Program Dukungan Manajemen
- 2 Penyelenggaraan Pemilu dalam proses Konsolidasi Demokrasi

Anggaran

Rp 10.252.187.000

Rp 3.652.389.000

Ambon, Januari 2024

Pihak Kedua
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Maluku



Syamsul Rifan Kubangun



Pihak Pertama
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Maluku



Ilham

